BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut data dari *Global Commission on International Migration* (GCIM) tahun 2005, sekitar 200 juta imigran atau 60% imigran di dunia berada di negara maju.[1] Semakin maju suatu negara, jumlah imigran diperkirakan bertambah sebesar 2,3 juta setiap tahunnya, bertambahnya jumlah imigran berdampak terhadap berbagai dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan politik suatu negara.[2] Sebagai salah satu negara penerima imigran terbesar di dunia, tercatat sebanyak 1 juta imigran memasuki perbatasan Amerika Serikat (AS) tiap tahunnya.[3] Sebagai respon atas fenomena tersebut, imigrasi AS memberlakukan kebijakan yang selektif terhadap imigran. Pada tahun 1986, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *Immigration Reform and Control Act* sebagai titik awal imigrasi yang lebih selektif di mana imigran tanpa dokumen dilarang untuk memasuki AS dan pemberlakuan hukuman bagi warga yang sengaja mempekerjakan imigran ilegal.

Berselang 15 tahun kemudian, Peristiwa 9/11 menjadi titik awal dimulainya kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang lebih restriktif, terjadi transformasi besar-besaran terhadap kebijakan imigrasi sebagai respon nasional atas ancaman terorisme.[4] Kebijakan *War on Terror* pada masa pemerintahan Presiden George Walker Bush gencar dilakukan sebagai upaya memperkokoh

[1] Global Commission on International Migration. *Migration in an Interconnected World: New Directions for Action.* Geneva: Switzerland (2005).
[2] Yavuz Kul. *Opportunuties And Challenges Of International Migration For Sending And Receiving Countries.* MFA Turkiye
[3] Department of Homeland Security. *Yearbook of Immigration Statistics 2019*. Office of Immigration Statistics, 2020.
[4] Migration Policy Institure. *Four Years of Profound Change: Immigration Policy during the Trump Presidency* (Washington DC, 2022)

struktur perbatasan, menjadikan isu imigran sebagai topik yang krusial di Amerika Serikat dan negara lainnya. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap imigran dari Timur Tengah dengan mayoritas Muslim yang seringkali dianggap sebagai 'teroris'.[5] Fenomena Islamofobia semakin menjadi di masyarakat, terlebih Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bush turut mengeluarkan kebijakan Invasi Irak dan Afghanistan, hal tersebut secara tidak langsung berdampak terhadap timbulnya persepsi ancaman dari imigran Muslim.[6]

Hubungan antara imigran Muslim dan Amerika Serikat mengalami fase naik turun, karena pergantian kepemimpinan membawa model pendekatan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama, hubungan AS dengan negara Muslim terjalin dengan baik. Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.[7] Kebijakan *America Firs*t *Policy* menyatakan, "*All countries must contribute in the fight against global terrorism and other shared threats",* yang digagas Trump dilatar belakangi oleh adanya persepsi ancaman terorisme oleh imigran Muslim.[8] Isu terorisme kembali memanas setelah sebelumnya mereda pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama.[9]

Pada tanggal 7 Desember 2015, dalam salah satu kampanye, Trump secara eksplisit menyatakan, *"Muslims represent an extraordinary influx of hatred & danger coming into our country"*. Pernyataan bermuatan kebencian (xenofobik)

[5] Moustafa Bayoumi. *This Muslims American Life: Dispatches from the War on Terror*. NYU Press, (2015).
[6] Shireen M Mazari. *The Muslim "Problematique" After the Iraq War*. Institute of Strategic Studies Islamabad, Vol. 23 (2): 1.
[7] Migration Policy Institure. *Four Years of Profound Change: Immigration Policy during the Trump Presidency* (Washington DC, 2022)
[8] White House Archive. *President Donald J. Trump at the United Nations General Assembly: Outlining an America First Foreign Policy*.
[9] Washington Post, 2016

tersebut menggiring persepsi yang salah terhadap agama tertentu tanpa landasan yang jelas. Sejak masa kampanye hingga masa Trump menjabat, *Council on American Muslim Relations* (CAIR) mencatat terjadinya kenaikan fenomena Islamofobia di Amerika Serikat sebesar 6-7% akibat pernyataan radikal Trump terhadap imigran Muslim. Selama bertahun-tahun Trump menggunakan ungkapan '*radical Islamic terrorism',* memperkuat sinonim yang salah antara 'Islam' dan 'terorisme'.[10] Sejak masa menjabat, Trump tercatat menggunakan frasa tersebut pada 26 kesempatan berbeda, menggunakan retorika anti-Muslim dan pernyataan xenofobik yang menjadi ciri khasnya, untuk meraih atensi masyarakat.[11]

Tepat pada tanggal 27 Januari 2017, Trump menandatangani perintah eksekutif pertama, *Executive Order No. 13769* yang berjudul *"Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States"*.[12] Kebijakan kontroversial tersebut merupakan implementasi janji kampanye untuk menangguhkan imigrasi dari kawasan dengan potensi terorisme. Kebijakan *Travel Ban* atau disebut juga dengan *Muslim Ban,* merupakan serangkaian kebijakan larangan perjalanan terhadap tujuh negara yang dianggap sebagai sumber ancaman terorisme. Negara-negara tersebut mayoritas regional Timur Tengah yakni Suriah, Iran, Libya, Irak, Yaman, Sudan, dan Somalia.[13] Meskipun Trump menegaskan kebijakan ini bukanlah diskriminasi terhadap agama tertentu, namun berfokus terhadap mengurangi faktor risiko. Adanya upaya untuk menghambat imigran dengan identitas tertentu untuk memasuki Amerika Serikat, dinilai

[10] Caroline Mala Corbin. *Terrorist Are Always Muslm but Never White: At the intersection of Critical Race Theory and Propaganda*. Fordham Law Review Vol. 86 (2): 476.
[11] Sundari Ayu Pratiwi. *American First: Kebijakan Donald Trump Dalam Pembatasan Kaum Imgiran ke Amerika Serikat*. Intermestic: Journal of Studies Vol.6 (1).
[12] Mohamed Arafa. *A question to the President of the United States, Donald Trump: is it a travel ban, or a Muslim ban, or a travel Muslim ban?*. Indiana University School of Law.
[13] Migration Policy Institure. *Four Years of Profound Change : Immigration Policy during the Trump Presidency* (Washington DC, 2022).

bertentangan dengan konstitusi yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang setara, termasuk sama haknya, termasuk hak setiap orang bebas berpindah ke tempat yang dikehendaki.[14]

Setelah Trump menandatangani kebijakan *Travel Ban* pertama, gelombang protes berdatangan dari berbagai pihak.[15] Terjadi ketimpangan pendapat antar kubu partai Demokrat dan Republik, sebanyak 64% suara dari partai demokrat mempercayai bahwa motivasi kebijakan tersebut didorong oleh Islamofobia. Beberapa negara bagian yakni Washington, Massachusetts, New York, dan Virginia menolak implementasi peraturan tersebut. Trump turut memecat Hakim Agung yang dilantik pada akhir jabatan Presiden Barrack Obama, yaitu Hakim Agung Sally Yates karena menilai *Travel Ban* tidak sesuai dengan prosedur hukum.[16] Berbagai kontroversi mendorong Trump untuk merevisi ulang dengan mengeluarkan *Travel Ban* kedua yaitu *Executive Order 13780*.[17] Dalam kebijakan ini imigran Sudan dan Irak dikeluarkan dari daftar hitam, namun akan diperiksa lebih lanjut ketika memasuki imigrasi.[18] Pada tanggal 24 September 2017, *Travel Ban* ketiga dikeluarkan, menambahkan negara Chad, Korea Utara, dan Venezuela ke dalam daftar hitam. Terdapat indikasi, bahwasanya penambahan negara dilakukan untuk menghindari anggapan *Travel Ban* hanya khusus untuk negara Muslim.

Sejak masa kampanye, Trump selalu mengeluarkan retorika anti-imigran hingga masa menjabat. Namun, persepsi negatif terhadap imigran Muslim justru

[14] Zaitun Mukaromah, Muzani, Muhammad Zid. *United States Government Policy Against Migrants (Muslims)*. Jurnal Mercatoria, Universitas Medan Area (2022).
[15] *Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Donald Trump*. CosmoGov, 2018.
[16] The Guardian, 2017.
[17] Mohamed Arafa. *A question to the President of the United States, Donald Trump: is it a travel ban, or a Muslim ban, or a travel Muslim ban?*. Indiana University School of Law.
[18] *Analisis Kebijakan Travel Ban Oleh Donald Trump*. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018, Hal.231.

berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Berdasarkan data dari *Cato Instute*, probabilitas kasus kematian yang diakibatkan oleh aksi teror dari imigran sebesar 1 berbanding 4,3 juta setahun. Sementara itu, probabilitas kasus kematian akibat tindakan kriminalitas sebesar 1 berbanding 20.134 setahun. Berangkat dari perbandingan tersebut, peluang tahunan terbunuh dalam kasus kriminalitas 316 kali lebih besar daripada kasus kematian akibat terorisme di Amerika Serikat.[19] Dengan demikian, penetapan kebijakan *Travel Ban* hingga beberapa kali iterasi dinilai tidak memiliki urgensi yang kuat.

Kebijakan *Travel Ban* memaksakan pengecualian secara menyeluruh daripada menganalisis keamanan individu para imigran, di situlah letak klaim diskriminasi daripada kontrol perbatasan yang sah itu sendiri.[20] Negara yang seharusnya menjadi tempat untuk menjamin keamanan beserta kesetaraan masyarakat malah melakukan tindak diskriminasi. Amerika Serikat sebagai negara yang menganut nilai demokrasi menyalahi nilai demokrasi itu sendiri dengan kebijakan *Travel Ban* terhadap imigran Muslim.[21] Kebijakan tersebut dianggap mencoreng nilai-nilai liberal Amerika yang mengutamakan kebebasan individu, serta menjadi tanah harapan bagi imigran di seluruh dunia.[22] Berdarkan hal tersebut, penulis menilai sekuritisasi terhadap imigran Muslim pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump layak untuk diteliti.

[19] Alex Nowrasteh. *Terrorism and Immigration: A Risk Analysis. C*ato Institute Policy Analysis No. 798 (2016): 1.
[20] University of Birmingham. *Trump's Immigration Ban: A Legacy of Securitized Immigration Rhetoric*. Diakses pada 5 Oktober 2024: https://www.birmingham.ac.uk/research/perspective/trumpimmigration-ban.aspx
[21] Jurnal Mercatoria, 80.
[22] Ben Fermor dan Jack Holland. *Security and Polarization in Trump's America: Securitization and The Domestic Politics of Threatening Others.*

1.2 Rumusan Masalah

Pasca peristiwa serangan 11 September 2001, kebijakan keamanan nasional Amerika Serikat mengalami pergeseran signifikan, ditandai dengan kebijakan *War on Terror* oleh Presiden George W. Bush. Imigran Muslim mulai diasosiasikan dengan potensi radikalisme dan terorisme. Konstruksi tersebut semakin menguat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump yang menggunakan narasi ancaman terorisme yang dibawa oleh imigran Muslim. Ketika resmi terpilih menjadi presiden, Trump mengeluarkan kebijakan Travel Ban yang bersifat deskriminatif, memuat larangan perjalanan imigran dari tujuh negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam yaitu Irak, Iran, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Afghanistan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab yaitu *"Bagaimana sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump?"*

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sekuritisasi terhadap isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan penelitian serupa di masa depan khususnya dalam bidang kajian sekuritisasi.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan akademisi terkait bagaimana proses terjadinya sekuritisasi di suatu negara.

1.6 Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan beberapa referensi dari beberapa penelitian sebelumnya. Studi pustaka pertama, penulis menggunakan jurnal yang ditulis oleh Dalia Yousef yang berjudul *Tracing the Trajectory: Exploring the Origins, Iterations, and Actions, and Impacts of the Muslim Travel Ban*. Penelitian ini memuat penjelasan mengenai titik awal kebijakan *Travel Ban*, proses implementasi kebijakan, dan model pendekatan yang diambil Presiden Donald Trump mengenai imigran Timur Tengah. Selain itu, tulisan ini juga memuat bagaimana persepsi keterkaitan terhadap imigran Muslim dan isu terorisme di tengah masyarakat. Jurnal ini berkontribusi besar untuk memahami kebijakan *Travel Ban* secara menyeluruh, spesifik kebijakan yang mengarah pada Muslim, diskursus yang dibangun Trump, proses pengesahan kebijakan, dan dampak terhadap imigran Muslim yang dianggap sebagai ancaman eksistensial pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis lebih spesifik menyoroti tahapan kebijakan *Travel Ban* sebagai bentuk sekuritisasi isu imigran Muslim Amerika Serikat.

Studi pustaka kedua, yakni berjudul *"The Impact of Migration Securitization on The Increase of Islamophobia-Based Attacts in The United*

States in 2015-2019" oleh Victoriana Melati.[23] Menjelaskan mengenai bagaimana Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Trump menjadikan isu migrasi sebagai agenda sekuritisasi dengan membatasi jumlah imigran yang masuk ke AS, khususnya imigran Muslim dengan kebijakan *Travel Ban.* Upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Trump dilakukan dengan membingkai isu imigran Muslim sebagai ancaman eksistensial yang membahayakan keamanan AS karena melakukan aksi terorisme. Trump menyampaikan sejumlah *speech-act* yang menyudutkan imigran Muslim guna politisasi ketakutan publik terhadap terorisme agar memilihnya di pemilu tahun 2016. Kemenangan Trump membuka langkahnya untuk melakukan sekuritisasi terhadap imigran Muslim melalui kebijakan *Travel Ban* dengan melarang masuknya imigran dari tujuh negara dengan mayoritas Muslim.

Kontribusi tulisan ini terhadap penulis adalah memberikan informasi bahwa upaya sekuritisasi isu imigran Muslim memberikan dampak buruk terhadap peningkatan serangan berbasis Islamofobia terhadap Muslim di Amerika Serikat. *Framing issue* Trump terhadap Muslim sebagai ancaman terorisme berhasil membuat publik membenci dan mengutuk imigran Muslim.[24] Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni lebih fokus pada upaya sekuritisasi isu imigran di masa Donald Trump.

Studi pustaka ketiga, penelitian berjudul *"Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump"*, oleh Yohannes

[23] Victoriana Melati. *The Impact of Migration Securitization on The Increase of Islamophobia-Based Attacts in The United States in 2015-2019.* Indonesian Journal of International Relations 4 (2020).

William Santoso dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Airlangga.[25] Jurnal ini mencoba menjelaskan mengenai relasi antara kemunculan ideologi nativisme sebagai bentuk dari proses konstruksi identitas bangsa nativis (penduduk asli) yang menggeser kecenderungan identitas nasional Amerika Serikat sebagai bangsa imigran. Penelitian ini berakar dari kebijakan pemerintahan Trump yang lebih bersifat restriktif dengan kecenderungan mengkriminalisasi imigran ilegal. Kebijakan tersebut menggambarkan jika Amerika Serikat merupakan bangsa nativis yang ekslusif dibandingkan bangsa imigran yang inklusif.

Kontribusi tulisan ini terhadap penelitian penulis adalah memberikan informasi mengenai pengaruh ideologi nativisme dalam sikap Donald Trump terhadap masalah imigran yang ditandai dengan adanya slogan *"Make America Great Again"*. Slogan ini mengisyaratkan keinginan Trump untuk membuat AS mencapai masa kejayaannya kembali melalui kebijakan yang berbasis *America First.* Ideologi nativisme ini erat kaitannya dengan pendukung aliran populisme yang dekat dengan partai sayap kanan yang memang anti terhadap imigran. Trump berusaha mengonstruksi identitas masyarakat AS melalui narasi di media. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat jika penelitian ini berfokus pada kecenderungan kebijakan di masa Donald Trump yang didukung oleh ideologi nativisme yang sudah mulai berkembang di masyarakat kontemporer. Perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penulis hanya menyoroti ideologi nativisme untuk memahami terbentuknya persepsi ancaman imigran Muslim.

[25] Yohanes William Santoso. *Kecenderungan Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat di Era Pemerintahan Donald Trump*. Hubungan Internasional, Universitas Airlangga (2019).

Studi pustaka keempat, selain memahami kecenderungan model pendekatan pada pemerintahan Trump, maka juga diperlukan tulisan yang membahas mengenai perbedaan sikap presiden Amerika Serikat mengenai masalah imigran melalui tulisan yang berjudul *"Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George Bush, Barack Obama, Donald Trump*".[26] Ayman Al-Sharafat menganalisis mengenai sikap Presiden Amerika Serikat terhadap imigrasi pada periode 2001-2009 yang dimulai pada masa George W. Bush hingga pada masa Presiden Donald Trump. Analisis sikap presiden diambil dari dokumen resmi masing-masing presiden mengenai upaya mereka dalam menyelesaikan masalah imigran. Pertama, Bush memiliki perhatian yang cukup besar terhadap masalah imigran dan berupaya melakukan reformasi komprehensif terhadap kebijakan imigrasi. Presiden Bush percaya bahwa imigran merupakan sumber daya penting bagi ekonomi AS. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan *Bilateral Cooperation Group on Immigration* tahun 2001 yang bekerjasama dengan pemerintah Meksiko. Namun, peristiwa 9/11 merubah arah kebijakan Amerika Serikat pada fokus keamanan.

Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama lebih terbuka dan ramah terhadap imigran karena ia berasal dari keturunan imigran. Obama menilai jika imigran memberikan kontribusi kepada negara, tak hanya dalam sektor ekonomi, namun juga pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun ia tidak bisa meloloskan *Dream Act Policy* untuk memudahkan imigran ilegal mendapatkan kewarganegaraan AS, namun ia sudah memberikan kesempatan kepada imigran ilegal yang memenuhi syarat untuk

[26] Ayman Al Sharafat. *Attitudes of the United States' Presidents Towards Immigration: George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump*. RSA Journal, Issue 30 (2019): 53-67.

tinggal sementara di AS sampai masa tiga tahun sebelum dideportasi melalui program DACA.

Sementara itu, Presiden Donald Trump menjadi satu-satunya Presiden dalam sejarah Amerika Serikat yang secara terbuka mengambil sikap garis keras tentang imigrasi. Trump gencar menyebarkan retorika anti-imigran untuk membentuk opini publik bahwa imigran merupakan ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Sikap Trump terlihat sangat berbeda jauh dengan pendahulunya, ia sangat agresif untuk membentuk kebijakan keras terhadap imigran. Penelitian ini berkontribusi dalam menganalisis perbedaan sikap Trump dan presiden-presiden sebelumnya dalam menyikapi masalah imigran. Namun perbedaannya, penelitian penulis akan berfokus pada kebijakan dan sikap keras Trump dalam sekuritisasi isu imigran Muslim.

Studi pustaka kelima, yang ditulis oleh Ben Fermor dan Jack Holland berjudul *"Security and polarization in Trump's America: Securitization and the Domestic Politics of Threatening Others".*[27] Tulisan ini membahas mengenai adanya perang posisi dan perubahan kebijakan luar negeri dalam perpolitikan Amerika Serikat di masa pemerintahan Donald Trump, khususnya mengenai sekuritisasi isu imigran. Upaya sekuritisasi isu imigran ditata rapi dalam kebijakan *Travel Ban*, meskipun Ben dan Jack menyatakan ancaman yang digaungkan Trump kurang eksistensial dan kurang mendesak untuk kemudian dibungkus dengan kebijakan luar biasa, yakni kebijakan *Travel Ban*. Tulisan ini berkontribusi dalam memberikan informasi bahwa terjadi perang posisi antara pandangan Partai Demokrat yang cenderung ramah terhadap imigran dengan

[27] Ben Fermor dan Jack Holland. *Security and Polarization in Trump's America: Securitization and The Domestic Politics of Threatening Others.* Global Affairs (2020): 1-17

Partai Republik yang cenderung anti terhadap imigran. Meskipun Kongres didominasi oleh Demokrat sementara Trump berasal dari partai Republik, kebijakan Trump untuk melakukan sekuritisasi terkait isu imigran mendapat dukungan dari kelompok minoritas kecil yang sangat vokal dalam Kongres, seperti Joe Wilson dan Louie Gohmert.

Pemerintahan Trump menuduh jika Demokrat dan kelompok sayap kiri yang mendukung nilai-nilai liberal merupakan ancaman tersendiri dari sisi internal AS. Demokrat dinilai lunak terhadap kejahatan, imigrasi dan terorisme dan menempatkan orang Amerika di posisi yang berbahaya karena kebijakan politik normal yang dinilai tidak mampu melindungi keamanan AS. Kritikus dari Demokrat serta media menilai bahwa kebijakan imigrasi di bawah pemerintahan Trump merupakan ancaman eksistensial bagi AS. Merujuk pada akibat dari kebijakan *Travel Ban* menjadi sorotan dan menerima sejumlah kritikan dari dunia internasional. Penelitian ini berkontribusi dalam memahami bagaimana sudut pandang kedua partai dalam melihat kebijakan sekuritisasi imigran Muslim. Perbedaannya, penulis berfokus pada sudut pandang Donald Trump sebagai aktor utama sekuritisasi dalam kebijakan *Travel Ban*.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Sekuritisasi

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis akan menggunakan teori sekuritisasi sebagai landasan analisis isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Donald Trump. Teori ini dicetuskan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde dalam buku *Security: A New Framework for Analysis* tahun 1998, dikenal juga dengan mazhab *Copenhagen School*.

Sekuriti atau keamanan dalam hubungan internasional memiliki karakteristik yang berbeda dengan terminologi yang digunakan sehari-hari. Apabila sekuriti sosial berakar pada keadilan dan hukum, maka sekuriti dalam hubungan internasional berakar pada kekuatan politik. Konteks sekuriti dalam hubungan internasional berkaitan dengan pemahaman militer tradisional, dimana bertahan hidup *(survive)* dan mempertahankan keamanan merupakan hal yang utama.[28] Suatu isu keamanan internasional dapat diidentifikasi sebagai sebuah masalah apabila berpotensi mengancam eksistensi wilayah, negara, pemerintah, ataupun kemanusiaan. Ancaman terhadap keamanan dapat menjadi justifikasi untuk pengambilan respon tindakan negara untuk menanganinya. Dengan menggunakan isu keamanan, negara memiliki kewenangan untuk menggunakan berbagai cara untuk mencegah ancaman lanjutan.

Sekuritisasi dalam studi *Copenhagen School*, merupakan langkah yang lebih ekstrim dalam politisasi suatu isu. Pemerintah memiliki andil dalam mengambil respon kebijakan dimana terdapat tindakan politisasi dari aktor politik terhadap isu ataupun ancaman eksistensial yang dianggap penting. Buzan menggambarkan sekuritisasi sebagai, *"Security is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics."*[29] Sekuritisasi merupakan tindakan konstruksi suatu isu dengan keamanan sebagai alasan utama, melibatkan tindakan politisasi untuk mengangkat isu tersebut sehingga melegitimasi untuk pengambilan respon di luar politik normal atau dengan menggunakan langkah

[28] Barry buzan, Ole Waever, & Jaap De Wilde. *Security a New Framework for Analysis*. USA: Lynne Rienner Publisher (1998): 21.
[29] Barry buzan, Ole Waever, & Jaap De Wilde. Security a New Framework for Analysis. Colorado, USA: Lynne Rienner Publisher (1998).

ekstrim. Buzan menyebutkan bahwasanya berbagai isu dapat dikonstruksi sehingga memiliki nilai keamanan dan penting untuk diperhatikan. Secara umum, terdapat tiga tingkatan kategori isu dalam spektrum sekuritisasi :

1. *Non-politicized*, sebuah isu tidak ditangani oleh negara namun berada atau didiskusikan dalam masyarakat, pemerintah belum menaruh perhatian terhadap isu tersebut karena dinilai tidak menyangkut kepentingan umum.
2. *Politicized*, sebuah isu telah masuk ke ranah pemerintahan. Dalam tahap ini isu dipolitisasi sehingga menjadi penting. Sebuah isu yang telah *politicized* diakui sebagai permasalahan, untuk itu dibutuhkan tindakan intervensi kebijakan dari pemerintah.
3. *Securitized*, sebuah isu dinilai memiliki faktor ancaman dan membahayakan. Sebuah isu membutuhkan tindakan darurat dari pemerintah melalui kebijakan diluar batas politik normal.

Sekuritisasi merupakan proses diskursif/konstruksi wacana terhadap suatu isu yang awalnya tidak dinilai sebagai ancaman, hingga menjadi penting dan bersifat mengancam. Isu memasuki tahapan sekuritisasi ketika terdapat upaya penanganan diluar prosedur politik normal oleh negara. Tindakan darurat dilegitimasi demi mempertahankan keamanan nasional. Isu dalam sekuritisasi tidak selalu bermuatan ancaman, namun dapat bertranformasi menjadi sebuah ancaman karena tindakan politisasi. Hal ini disebut dengan praktik s*elf-referential*, yaitu pergeseran suatu isu dari politik normal menjadi politik darurat, akan tetapi sebuah isu tidak benar-benar membutuhkan tindakan diluar politik normal karena benar-benar memiliki ancaman eksistensial.

Dalam proses sekuritisasi, *Copenhagen School* melihat bahwa tindakan untuk membingkai suatu isu hingga dipahami secara kolektif sebagai sebuah ancaman dapat digunakan dengan medium bahasa melalui *speech act. Speech act* atau disebut juga dengan tindak tutur, menggunakan medium bahasa untuk mengubah suatu isu menjadi masalah keamanan. Melalui *speech act*, aktor sekuritisasi menyatakan suatu isu sebagai ancaman eksistensial hingga diterima audiens sebagai sebuah ancaman. Melalui *speech act*, aktor dapat membingkai suatu isu non-politik hingga berstatus *securitized.* Buzan menjelaskan bahwa dalam melakukan analisis dan pengartikulasian keamanan melalui pendekatan *speech act*, terdapat lima komponen dalam upaya sekuritisasi yang terdiri dari:

1. *Existential threat* (ancaman eksistensial), yakni bentuk ancaman yang muncul dari isu yang dianggap mengancam keamanan nasional. *Existensial threat* menjadi dasar *securitizing actors* dalam melaksanakan sekuritisasi karena dinilai mengancam kelangsungan *referent object. Existential threat* dalam penelitian ini adalah imigran Muslim yang dianggap sebagai ancaman terorisme di Amerika Serikat.
2. *Referent object* (objek yang dilindungi), merupakan sesuatu yang dilihat secara nyata terancam serta memiliki tuntutan resmi untuk bertahan atau mempertahankan diri. Dalam pandangan tradisional, yang menjadi *referent object* ialah negara ataupun bangsa. Adapun *referent object* bagi negara adalah kedaulatan, sedangkan bagi bangsa adalah identitas. Namun *referent object* ternyata tidak hanya sebatas pada negara dan bangsa, tetapi juga berbagai hal yang berpotensi untuk menjadi *referent object*. Keberhasilan atau kegagalan aktor dalam meyakinkan publik

terhadap perubahan suatu isu ke isu keamanan, tergantung kepada kemampuan setiap aktor dalam membingkai serta mengagendakan isu bersangkutan.

3. *Securitizing actors* (aktor sekuritisasi), yakni aktor baik individu maupun kelompok yang menggunakan *speech act,* berperan dalam menjadikan sebuah isu biasa bertransformasi menjadi isu keamanan. *Securitizing actors* akan menyampaikan berbagai bentuk ancaman eksistensial apabila isu keamanan tersebut tidak ditangani dengan cepat serta harus ditangani dengan metode di luar politik normal. Dalam penelitian ini, *securitizing actors* terhadap isu imigran Muslim di Amerika Serikat adalah presiden Donald Trump.
4. *Functional actors* (aktor fungsional), yakni aktor yang memiliki dampak tidak langsung terhadap dinamika pembuatan kebijakan, memiliki peran penting namun tidak berupaya mengubah isu menjadi isu keamanan. *Functional actors* menentukan perkembangan dari proses sekuritisasi tanpa harus menjadi *securitizing actor* maupun *referent object,* dalam penelitian ini *functional actors*-nya adalah media. Media berperan besar dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap dinamika imigran Muslim di Amerika Serikat.
5. *Audience* (Audiens), merupakan pihak atau target yang akan dipersuasi oleh aktor sekuritisasi dalam rangka mendapatkan pesetujuan untuk melakukan tindakan sekuritisasi terhadap suatu isu. Dimana nantinya audiens diharapkan melegitimasi isu yang disekuritisasi oleh aktor sekuritisasi, yang dalam hal ini diwakili oleh penduduk AS.

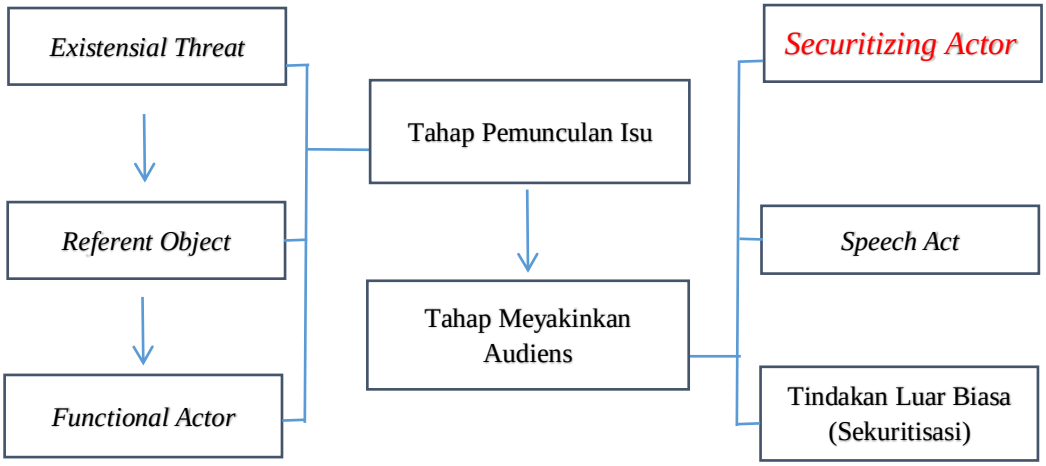

Tabel 1.1 Skema Sekuritisasi
Sumber : Diolah oleh penulis

Speech act dianggap berhasil apabila tercapainya konsensus publik kemudian melegitimasi tindakan pembentukan kebijakan di luar aturan politik normal. Seperti yang diklaim Buzan, tindakan mempresentasikan suatu isu sebagai ancaman eksistensial bukanlah sekuritisasi, melainkan bagian dari langkah sekuritisasi. Ketika masalah keamanan diterima oleh audiens dan upaya luar biasa *(extraordinary measure)* di luar ranah politik normal diizinkan penerapannya untuk melawan ancaman tersebut, maka isu tersebut telah disekuritisasi. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keberhasilan dari tindakan sekuritisasi ditentukan oleh kemampuan aktor dalam meyakinkan audiens bahwa terdapat *existensial threat* (ancaman eksistensial) yang mengancam kelangsungan *referent object* (objek yang dilindungi) sehingga berakibat fatal apabila tidak ditangani secara tepat dan cepat.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan kualitatif menekankan pada pemahaman anggapan individu ataupun kelompok masyarakat dan berfokus pada peristiwa alami, nyata, subjektif, dan interaktif dengan partisipan, untuk memperoleh makna daripada perluasan data.[30] Adapan jenis penelitian ini adalah deskriptif-analisis bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap fenomena ataupun peristiwa yang terjadi berdasarkan data dan fakta di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menggambarkan mengenai sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat periode pemerintahan Donald Trump

1.8.2 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian berdasarkan rentang waktu dan batas wilayah penelitian. Penulis mendapati bahwa proses sekuritisasi isu imigran di mulai dilakukan sejak masa kampanye presidensial hingga terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45. Penelitian ini dibatasi sejak masa kampanye pada tahun 2015 hingga diresmikannya *Travel Ban* pada tahun 2017.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Dalam penelitian studi hubungan internasional, unit dan level analisis memiliki peran penting untuk menentukan fokus penelitian. Unit analisis disebut juga dengan variabel dependen, merupakan objek yang akan diteliti perilakunya.[31] Berdasarkan latar belakang penelitian, unit analisis dalam penelitian ini adalah

[30] Barker, 2002
[31] Mochtar Mas'oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, (1990): 39.

sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat. Sementara itu, unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi unit analisis, disebut juga dengan variabel independen.[32] Unit eksplanasi dalam penelitian adalah persepsi ancaman imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Level analisis merupakan tingkatan objek penelitian, menentukan level analisis yang sesuai dapat membantu penelitian dalam memilih faktor yang ditekankan.[33] Level analisis dalam penelitian ini berada di tingkat negara-bangsa.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi mengenai topik yang dibahas, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan *(library research)* yang bersumber dari data sekunder, seperti buku, arsip negara, dokumen, jurnal, artikel dalam media digital, arsip, laporan, dan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku yang ditulis oleh Barry Buzan, Ole Waever, & Jaap de Wilde yang berjudul *"A New Framework for Analysis"*. Untuk mengakses informasi di internet penulis menggunakan kata kunci Sekuritisasi, Travel Ban, Donald Trump dan sebagainya. Peneliti menggunakan referensi dari lembaga penelitian dan website pemerintah mengenai isu imigran, seperti *National Archives, US Department of Homeland Security (DHS), United State Department of Justice,* Dokumen Publik Presiden, dan lainnya. Penulis juga memanfaatkan sumber lain yang relevan, baik dari situs resmi, berita, survey, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan topik pembahasan. Peneliti menggunakan data dari badan lembaga survey *Pew Research Center* serta lembaga serupa, jurnal Harvard, Britannica, dan arsip negara bagian Amerika

[32] Mochtar Mas'oed, *39.*
[33] Mochtar Mas'oed, 41.

Serikat untuk memahami bagaimana dinamika isu imigran Muslim ditengah masyarakat.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.[34] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles and Huberman dalam buku *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* tahun 1994. Terdapat 3 tahapan dalam proses menganalisis data penelitian, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*conclusions*), sebagai berikut :

1) Reduksi Data

   Reduksi data adalah merangkum, memfokuskan dan memilih hal- hal yang penting atau pokok, mencari tema dan pola, memilah hal yang dianggap perlu dan tidak dibutuhkan, kemudian penyederhanaan. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengidentifikasi persepsi ancaman imigran Muslim dan terorisme di Amerika Serikat lalu mengaitkannya dengan respon kebijakan *Travel Ban* sebagai bentuk sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Penulis menggunakan Sekuritisasi sebagai kata kunci

[34] Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (2013).

yang utama untuk mereduksi pembahasan, dilanjutkan dengan kata kunci *Travel Ban*, Muslim, dan Donald Trump untuk mereduksi pembahasan yang sesuai dengan topik yang penulis bahas. Setelah itu, penulis mereduksi lagi berdasarkan batasan penelitian yaitu tahun 2015 hingga 2018 untuk memperoleh sumber rujukan yang maksimal

2) Penyajian data

Tahap penyajian data penulis merupakan tahap pengorganisasi informasi untuk menemukan pola-pola yang bermakna sehingga memungkinkah untuk penarikan kesimpulan.[35] Setelah data direduksi penulis akan menyajikan data berdasarkan komponen yang terdapat dalam sekuritisasi yakni aktor sekuritisasi (*securitizing actor*) yaitu kelompok pelaksana yang melakukan tindak tutur (*speech act)*, ancaman eksistensial (*existensial threat*) yaitu ancaman yang menjadi dasar aktor sekuritisasi mengamankan referent object dalam hal ini ancaman terorisme imigran, objek yang dilindungi (*referent object*) merupakan keamanan warga negara, aktor fungsional (*functional actor*) yang terlibat secara tidak langsung terlibat namun berdampak terhadap sekuritisasi yakni media yang berperan menyebarkan *speech act* aktor sekuritisasi, serta audiens (*audience*) dimana legitimasi audiens atau masyarakat merupakan hal yang penting sehingga memberi persetujan aktor untuk melaksanakan aksi darurat.

[35] Matthew Miles dan Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook.* California, SAGE Publication, (1994): 11.

3) Menarik kesimpulan

Dalam tahapan penarikan kesimpulan, setelah penulis melakukan kedua tahapan di atas dengan menyajikan data dan menganalisis jawaban dari data-data tersebut kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan hingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Pada tahap ini, penulis akan menjelaskan sekuritisasi isu imigran Muslim di Amerika Serikat menggunakan komponen sekuritisasi secara komprehensif. Dalam sekuritisasi, terdapat dua tahapan utama yaitu tahapan pemunculan isu dimana aktor sekuritisasi berusaha memunculkan isu yang ingin dikonstruksi di tengah masyarakat dan melabeli hal tersebut penting untuk dibahas karena bermuatan keamanan. Tahap selanjutnya adalah tahap legitimasi audiens untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya isu yang diangkat aktor sekuritisasi layak untuk dilaksanakan aksi darurat. Oleh karena itu, keberhasilan sekuritisasi terletak pada kemampuan aktor dalam mengonstruksi sebuah isu.

1.9 Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penyusunan penelitian dan dapat dijadikan referensi yang baik, peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi alasan peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap bagaimana kebijakan Amerika Serikat pada era pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap imigran Muslim. Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Persepsi Ancaman Donald Trump Terhadap Imigran Muslim di Amerika Serikat

Bab ini akan menjelaskan mengenai persepsi ancaman imigran Muslim yang digambarkan Donald Trump sebagai *radical Islamic terrorism*. Keberadaan imigran Muslim dinilai membahayakan karena membawa potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Diskursus keamanan yang berusaha dibangun berkaitan dengan peristiwa serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat. Isu terorisme imigran Muslim kembali diangkat Trump seiring meningkatnya ketegangan konflik geopolitik di Timur Tengah dan masuknya gelombang pengungsi dari daerah rawan konflik ke Amerika Serikat.

BAB III Kebijakan Donald Trump Terhadap Isu Imigran Muslim di Amerika Serikat

Bab ini akan membahas sekilas mengenai kebijakan *Global War on Terror* (GWOT) Amerika Serikat era pemerintahan George Walker Bush, sebagai awal mula sentimen teroris imigran Muslim Amerika Serikat. Hal tersebut berdampak terhadap kebijakan *Travel Ban* yang diambil oleh pemerintahan Donald Trump. Selain itu, penulis akan membandingkan mengenai model pendekatan imigran pada masa pemerintahan Barrack Obama. Periode ini dipilih sebagai pembanding karena pendekatan yang lebih humanis terhadap imigran Muslim daripada pemerintahan sebelumnya dan sesudahnya.

BAB IV Sekuritisasi Isu Imigran Muslim Amerika Serikat Era Pemerintahan Donald Trump

Dalam bab ini, peneliti menggunakan kerangka konsep sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde dalam menganalisa bagaimana isu imigran di Amerika Serikat disekuritisasi pada masa pemerintahan Donald Trump.

BAB V Penutup

Bab ini akan memuat ringkasan dari keseluruhan pembahasan bab sebelumnya serta kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini terhadap topik penelitian yang diteliti.